

## **BAB V KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang ada, maka dapat diambil garis merah skripsi yang berjudul “Politik Luar Negeri Australia Terhadap Indonesia (1949-1966)” ini. Australia yang nama resminya *The Commonwealth of Australia* adalah suatu federasi yang terdiri dari enam negara bagian. Secara geografis Australia diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Garis pantai Australia di bagian utara berbatasan dengan Kepulauan Indonesia. maka dari itu Australia beranggapan pertahanan militer Australia secara tradisional terpusat pada garis pantai utaranya. Hal ini menjadikan Indonesia bagian penting terhadap keamanan Australia.

Dua negara yang masih asing merupakan gambaran yang paling tepat pada masa sebelum Perang Dunia II. Australia hanya menaruh sedikit perhatian dan kontak dengan Indonesia. Sejak pendudukan Jepang di Indonesia pada 1942 Australia mulai terlibat dalam berbagai masalah yang melibatkan antara Indonesia dengan Belanda. Penjajahan Jepang tersebut membuat Belanda membentuk pemerintahan pengasingan di Australia dan banyak tawanan Indonesia yang di asingkan di sana. Para tawanan dari Indonesia ini mengirimkan surat kepada Serikat Buruh Pelabuhan agar minta di bebaskan. Tanggapan terhadap surat ini begitu cepat dan kuat Serikat Buruh Australia melakukan demonstrasi untuk membebaskan para tawanan dan akhirnya berhasil.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diproklamlirkan pada 17 Agustus 1945. Mendapatkan sambutan yang cukup semarak oleh orang-orang Indonesia yang

berada di Australia pada 18 Agustus 1945, mereka menyambut kemerdekaan Indonesia dengan mengadakan demonstrasi besar-besaran di Sydney. Demonstrasi ini didukung oleh orang-orang Australia yang bergabung dalam Buruh Pelabuhan Australia dan Serikat Buruh lainnya. Sedangkan pemerintah Australia belum merespon akan hal kemerdekaan Indonesia itu.

Pada masa awal kemerdekaan ini, Australia mulai terlibat dan mendukung Indonesia ketika Belanda melancarkan aksi polisional yang pertama pada 21 Juli 1947. Pemerintah Australia prihatin akan hal itu dan mengusulkan masalah Indonesia ke Dewan Keamanan PBB. Usul tersebut diterima kemudian dibentuk sebuah Komisi Jasa-Jasa Baik atau yang dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN), dan Australia ditunjuk oleh Indonesia sebagai wakilnya. Selanjutnya di tandatangani Perjanjian Renville terhadap masalah sengketa Indonesia-Belanda.

Pada 18 September 1948 Partai Komunis melakukan pemberontakan di Madiun, Belanda mengambil kesempatan situasi ini dengan melancarkan aksi Polisional yang kedua. Atas aksi ini Australia memberi reaksi keras melalui Departemen Luar Negerinya, tetapi dibalik dukungan Australia terhadap Indonesia pada awal kemerdekaan Indonesia ini, Australia mempunyai kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan keamanan dan ekonomi negaranya.

Pada 10 Desember 1949 diadakan pemilihan umum dan menghasilkan kekalahan bagi Partai Buruh sebagai gantinya munculnya pemerintahan Partai *Liberal-Country*. Kemenangan Partai *Liberal-Country* tentu saja merubah sikap kebijakan politik luar negeri Australia terhadap Indonesia yang sebelumnya

mendukung lewat berbagai forum internasional sekarang berbalik arah. Sikap pemerintah Australia ini juga dipengaruhi setelah KMB antara Indonesia-Belanda yang mempermasalahkan status dari kepemilikan Irian Barat. Selanjutnya masalah Irian Barat ini yang banyak menentukan kebijakan politik luar negeri Australia terhadap Indonesia pada tahun 1949-1962.

Kebijakan politik luar negeri Australia sejak masalah Irian Barat muncul ke permukaan, pemerintah Australia mulai banyak mengadakan diplomasi kepada Indonesia melalui pertukaran kunjungan antar menteri luar negeri kedua negara. Pertukaran kunjungan antar menteri luar negeri ini, membawa dampak yang berbeda bagi masing-masing pihak. Pihak Australia berpandangan Indonesia akan berjuang habis-habisan untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayahnya. Sedangkan Indonesia justru tidak terlalu memperhatikan campur tangan Australia karena lebih fokus kepada Belanda. Usaha Indonesia untuk memasukkan masalah Irian Barat ke dalam agenda pembicaraan Sidang Majelis Umum PBB pada 1954, 1955, dan 1957 ini mengalami kegagalan karena tidak memperoleh 2/3 suara. Hal ini terjadi karena lobi-lobi yang dilakukan oleh Australia terhadap negara-negara Eropa dan Amerika berjalan dengan baik, sehingga dapat menggagalkan usaha Indonesia untuk dibicarakan dalam agenda Sidang Majelis Umum PBB.

Kebijakan selanjutnya dari Australia dalam membendung klaim Indonesia atas Irian Barat adalah mengadakan kerjasama bilateral bagi penyelenggaraan pemerintahan bersama di Irian Barat pada 1957. Kerjasama ini dilakukan untuk menguatkan Belanda di Irian Barat karena ada kekhawatiran akan kekuatan militer

Indonesia yang semakin menguat karena mendapat bantuan dari negara komunis seperti Uni Soviet.

Usaha untuk membina hubungan baik juga dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap Indonesia walaupun Australia lebih mendukung Belanda dalam masalah Irian Barat. Politik bertetangga baik dilakukan dengan pertukaran kunjungan pejabat tinggi kedua negara. Pada 15 Februari 1959 Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio berkunjung ke Australia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia R.G. Casey, dari pertemuan itu menghasilkan kesepakatan Casey-Subandrio. Kesepakatan itu menghasilkan bahwa Australia tidak akan menentang setiap persetujuan yang disepakati antara Indonesia dan Belanda. Namun sikap pemerintah ini ditentang oleh oposisi dan sebagian rakyat Australia.

Terpilihnya Presiden Kennedy sebagai Presiden Amerika Serikat menyebabkan kebijakan politik luar negeri Amerika yang awalnya bersikap netral menjadi lebih aktif terhadap masalah Irian Barat. Keberpihakan Amerika Serikat terhadap Indonesia ini membuat pemerintah Australia melakukan langkah-langkah diplomasi yang selaras dengan Amerika Serikat dalam mendesak Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dengan tanpa harus menempuh jalan perang. Pada 25 Maret 1962 perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat, puncak perundingan ini adalah disepakati Persetujuan *New York*, yang isinya penyerahan Irian Barat dari Belanda kepada pemerintahan sementara PBB (UNTEA) dan pada 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan kepada

Indonesia. Selesainya masalah Irian Barat membuat Australia dan Indonesia menjadi lebih baik.

Politik konfrontasi yang di jalankan Presiden Soekarno tetap di jalankan selang lima bulan setelah penyelesaian masalah Irian Barat. Pembentukan Federasi Malaysia selanjutnya di tentang oleh Indonesia. Indonesia beranggapan bahwa pembentukan Federasi Malaysia hanyalah sekedar alat untuk mempertahankan kekuasaan Inggris di kawasan Asia Tenggara yang pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap kawasan Indonesia. Australia menolak politik konfrontasi Indonesia karena Australia terikat dengan Malaysia dalam Persemakmuran Inggris, dan juga Malaysia merupakan bagian integral dari garis pertahanan Australia sendiri.

Pemerintah Australia mengambil sikap keras pada Bulan September 1963, sesudah pemerintah Indonesia menerima keputusan misi pencari fakta PBB dan sesudah Kedutaan Besar Inggris dan Malaysia di serang di Jakarta. Pada Agustus 1964, Indonesia meningkatkan serangannya di Kalimantan. Hal ini membuat Pemerintahan Robert Menzies mengambil langkah eskalasi konflik dengan mengumumkan dinas wajib selektif dan meningkatkan belanja pertahanan untuk membantu Malaysia. Atas invasi itu Malaysia mengadakan ke Dewan Keamanan PBB dan resolusi Norwegia dikeluarkan dengan dilakukan pemungutan suara. Resolusi diterima dengan suara 9 lawan 2, tetapi di Veto oleh Uni Soviet.

Pada 7 Januari 1965 Presiden Soekarno menyatakan keluar dari anggota PBB karena Malaysia diterima menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Keluarnya Indonesia dari PBB membuat Indonesia menjadi lebih dekat dengan blok komunis,

dan membentuk Poros Jakarta-Peking-Hanoi. Pemerintah Australia melihat perkembangan ini dengan penuh keprihatinan karena meningkatnya pengaruh komunis terhadap Indonesia.

Pemberontakan G30S/PKI yang gagal namun telah menyebabkan terbunuhnya perwira TNI-AD membuat suasana dalam negeri Indonesia bergolak. Pada 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) kepada Let.Jend Suharto. Salah satu usahanya adalah normalisasi hubungan dengan Malaysia, dengan mengirimkan misi muhibah ke Malaysia untuk bertemu dengan Tun Abdul Razak dan Tengku Abdul Rahman. Selanjutnya diadakan perundingan di Bangkok pada 29 Mei - 1 Juni 1966 dan mencapai kesepakatan perdamaian tetapi untuk status Sabah dan Serawak di bicarakan kemudian.

Pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta di tandatangi persetujuan normalisasi hubungan kedua negara dan kedua pemerintahan setuju untuk memulihkan hubungan diplomatik. Atas persetujuan itu berakhir Konfrontasi Indonesia-malaysia yang berlangsung selama kurang lebih tiga tahun. Pada 12 Maret 1967 Letnan Jendral Soeharto diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua menggantikan Presiden Soekarno. Sejak saat itu hubungan Indonesia dengan Australia berkembang semakin luas dan mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Adi Sumardiman. (1982). *Wawasan Nusantara*. Jakarta: Yayasan Harapan Nusantara.
- Amzulian Rifai. (1994). *Pengantar Konstitusi Australia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chauvel, Richard .H, dkk. (2005). *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Bilateral*. Jakarta: Granit.
- \_\_\_\_\_. (1995). "Politics Down Under: Kehidupan Politik dalam Negeri Australia", dalam Sujinah Harlinah dan Ismu (Ed). *Budaya dan Politik Australia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Cholil. M. (1971). *Sejarah Operasi Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan.
- Critchley, Susan. (1995). "Australian Relations with Indonesia: What Went Wrong", a.b, Sugiarta Sriwibawa. *Hubungan Australia dengan Indonesia: Faktor Geografi, Politik dan Strategi Keamanan*. Jakarta: UI Press.
- Daldjoeni. N. (1991). *Dasar-Dasar Geografi Politik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- De Gues, P.B. R. dan Nijhoff, Martinus. (2003). "De Nieuw-Guinea Kwestie: Aspecten van Buitenlands Bele'id en Militaire Macht". a.b. Yayasan Jayawijaya. *Masalah Irian Barat Aspek Kebijakan Luar Negeri dan Kekuatan Militer*. Jayapura: Yayasan Jaya Wijaya.
- Departemen Penerangan RI. (1964). *Gelora Konfrontasi Mengganjang Malaysia*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1993). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Dudung Abdurahman. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Frans. S. Fernandes. (1988). *Hubungan Internasional dan Peranan Bangsa Indonesia Suatu Pendekatan Sejarah*. Jakarta: Depdikbud.

- Gottschalk, Louis. (1975). *“Understanding History: A Primer of Historical Method”*. a.b. Nugroho Notosusanto. *Mengerti sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hadi Soebadio. (2002). *Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/PERMESTA*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Helius Sjamsuddin dan Ismaun. (1993). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Depdikbud
- Hidayat. F.A dan H.G.Aburasyid. (2007). *Ensiklopedia: Negara-Negara di Dunia*. Bandung: Pustaka Grafika
- Hidayat Mukmin. (1991). *TNI dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Hilman Adil. (1993). *Hubungan Australia dengan Indonesia 1945-1962*. Jakarta: Djambatan.
- \_\_\_\_\_. (1997). *Kebijaksanaan Australia Terhadap Indonesia 1962-1966*. Jakarta :CSIS.
- Jurusan Pendidikan Sejarah. (2006). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah, FISE UNY.
- Kedutaan Besar Australia. (2000). *Australia Selayang Pandang*. Jakarta: Citra.
- \_\_\_\_\_. (1981). *Hubungan Indonesia-Australia ceramah Sir Keith Shann:Tetangga*. Jakarta: kantor penerangan Australia.
- Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- \_\_\_\_\_. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Leifer, Michael. (1996). “Indonesia’s Foreign Policy”. a.b. A. Ramlan Surbakti. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mackie, J.A.C. (1974). *Konfrontasi the Indonesia-Malaysia Dispute 1963-1966*. *Kualalumpur*: Oxford University Press.
- Margaret, George. (1986). “Australia and the Indonesia Revolution”. a.b, Hermawan Sulistyو dan Wardah Hafidz. *Australia dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: Panja Simpati.



- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- \_\_\_\_\_. (1992). *Sejarah Nasional Indonesia: Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad Yamin. (1956). *Pembebasan Irian Barat atas Dasar Proklamasi*. Jakarta: Nusantra.
- Nugroho Notosusanto. (1997). *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*. Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan.
- \_\_\_\_\_. (1978). *Masalah Penelitian Sejarah kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Ratih Hardjono. (1991). *Suku Putihnya Asia:Perjalanan Australia Mencari Jati Dirinya*. Jakarta: Gramedia
- Redaksi Ensiklopedia Indonesia. (1990). *Eksiklopedia Indonesia Seri Geografi Australia Oseania*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- \_\_\_\_\_. (1990). *Eksiklopedia Indonesia Seri Geografi Indonesia*. Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ricklefs, M.C. (1991). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rosihan Anwar. H. (2007). *Sukarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siboro. J. (1989). *Sejarah Australia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sidi Gazalba. (1996). *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Sunarso, dkk. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Syahbudin Mangandaralam. (1986). *Mengenal dari Dekat Australia Benua Kangguru*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Thayer, Carlyle. A. (1992). "Australia and Southeast Asia" in F.A. Mediansky (Ed). *Australia in a Changing World: New Foreign Policy Direction*. Australia: Maxwell MacMillan Publishing.

Zulkifli Hamid. (1999). *Sistem Politik Australia*. Jakarta: LIP- FISIP UI & Remaja Rosda karya.

### Skripsi

Andi Kurniawan. (2006). *Pengaruh konflik Indonesia Belanda mengenai Irian Barat terhadap Hubungan Australia Indonesia (1945-1962)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Endang Wahyuningsih. (1993). *Konfrontasi Indonesia-Malaysia Dalam Konsepsi Politik Luar Negeri Bebas Aktif*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Warjo. (1995). *Analisis Hubungan Australia-Indonesia 1945-1992*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

### Internet

Australia Asia Worker Links. (Minggu 21 Maret 1999). *Anggota-anggota Serikat Buruh mendukung Hak atas Tanah*. Tersedia dalam [http://archive.aawl.org.au/documents/pdf/our\\_mixed\\_history\\_indonesian\\_mar\\_99.pdf](http://archive.aawl.org.au/documents/pdf/our_mixed_history_indonesian_mar_99.pdf). Diakses 12 April 2010 pukul 23.22

Buku Sekolah Elektronik. (2009). *Perkembangan Lembaga-Lembaga Internasional dan Peran Indonesia dalam Kerjasama Internasional*, [http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Perkembangan\\_LembagaLembaga\\_Internasional\\_dan\\_Peran\\_Indonesia\\_dalam\\_Kerjasama\\_Internasional\\_9.2\\_%28BAB\\_14%29](http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Perkembangan_LembagaLembaga_Internasional_dan_Peran_Indonesia_dalam_Kerjasama_Internasional_9.2_%28BAB_14%29). Diakses 1 Mei 2010 pukul 21.30

Jeny Sibarani. (2008). *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan antara Tahun 1945-1950an*. Tersedia <http://sejarahkita.comoj.com/jenny112.html>. Diakses 12 Mei 2010 pukul 11.14

Kedutaan Besar Australia. (2009). *Hubungan Australia-Indonesia*. Tersedia dalam <http://www.dfat.gov.au/aii/publications/bab11/index.html>. Diakses 9 April 2010 pukul 00.15

Ninati Apainop. (6 Januari 2008). *Tentang Nama Papua*. Tersedia pada <http://digoel.wordpress.com/2008/01/06/tentang-nama-papua/>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2010 pukul 11.44

Pemerintah Australia. (2009). *Australia's Involvement*. Tersedia dalam <http://seasia.commemoration.gov.au/australianinvolvementnindonesianconfrontationaustralian-involment.php> diakses 3 Mei 2010 pukul 19.37

- Pemerintah Indonesia. (2009) *Posisi Geografis Indonesia*. Tersedia dalam <http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com>. Diakses 29 Maret 2010 pukul 21.5.
- United Nations. (2009). *Charter of The United Nations*. Tersedia dalam <http://www.un.org/en/documents/charter/chapter7.shtml>. Diakses 14 April 2010 pukul 01.11